



PEMKAB. LUWU TIMUR
RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2022

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Malili, Juli 2022
KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH,


MUHAMMAD SAID, SE,MM

Pangkat : Pembina

NIP. 19790313 200502 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPENDA.	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA.....	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA.....	
3.3 Program dan Kegiatan BAPENDA.....	
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	
 BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2022 (APBD Perubahan).

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Permendagri 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk:

- a. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS Perubahan) Tahun 2022.
- c. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun sebelumnya.
- d. Mensinergikan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka sistematika penyusunan Renja Perubahan BAPENDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPENDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat uraian tentang gambaran kedudukan BAPENDA, rencana Kerja BAPENDA, keterkaitan antara Renja BAPENDA dengan Dokumen RKPD dan Renstra BAPENDA.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BAPENDA Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPENDA.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPENDA, serta susunan garis besar isi dokumen setiap BAB beserta Sub BAB sesuai Permendagri 86 Tahun 2017.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja BAPENDA Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPENDA.

Memberikan uraian dan penjelasan dari hasil pelaksanaan Renja setiap program kegiatan dan capaian Renstra BAPENDA.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPENDA

Menjelaskan dan menyajikan hasil analisa kinerja pelayanan BAPENDA serta indikator yang mempengaruhi kinerja tersebut.

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA
Permasalahan yang dikedepankan untuk ditanggapi yang dianggap penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPENDA.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Menyajikan tabel perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menggambarkan dan menguraikan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BAPENDA

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menguraikan dan menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BAPENDA.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA
Menguraikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPENDA.
- 3.3 Program dan Kegiatan BAPENDA
Menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan BAPENDA.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BAPENDA

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja Instansi Pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja BAPENDA Kabupaten Luwu Timur.

Secara umum, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah (Renja BAPENDA) dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja dan sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja Perangkat Daerah, untuk kemudian dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang ditetapkan.

Terkait dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan tahun berjalan dan perkiraan target tahun 2023.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Renja Pokok Tahun Anggaran 2022 Pagu Murni sebesar **Rp. 12,267,803,648,-** (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) sedangkan pada Renja Perubahan 2022 pagu sebesar Rp 15,267,803,150 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah). **Diharapkan Realisasi Penerimaan Pendapatan Tahun 2022 dapat tercapai** dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan sehingga pada Tahun 2022 diperkirakan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 15.267.803.150,-** (*Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*) sesuai dengan pemetaan Permendagri 90 (Tabel Terlampir).

Adapun terkait rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2021 masih bergabung dengan instansi Induk yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur baru terbentuk pada tanggal 30 Desember tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dalam mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 pada Misi 4 yaitu **Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik** dengan tujuan **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber Belanja Daerah**, maka dalam pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran tersebut Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan pelayanan dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah keseluruhan 23 (dua puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 22 (dua Puluh Dua) orang Tenaga Upah Jasa. Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia.

Untuk pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menggunakan program aplikasi SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah) yang bertujuan untuk :

1. Aplikasi Simpada ini merupakan sebuah platform sistem yang mempunyai 2 fungsi utama, yakni sebagai pengelola database, dimulai dari pendaftaran, pelaporan, penetapan, pembuatan kode billing sampai dengan penyajian laporan. Simpada juga memiliki fungsi API (Aplication Procesing Interface) yang bisa menghubungkan Simpada dengan sistem lainnya.
2. Menggunakan sistem komputerisasi secara optimal dan maksimal sehingga dapat menghasilkan laporan yang tepat dan akurat.
3. Menyiapkan suatu manajemen report sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk mempermudah para pimpinan didalamnya mengambil keputusan dan mengelola administrasi dan keuangan yang ada.
4. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mampu memanfaatkan alat bantu komputer didalam mengefisiensikan dan mengefektifkan tugas sehari-hari.

Selain Aplikasi yang digunakan, untuk pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah yang salah satunya melalui penerimaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kab.Luwu Timur juga berinovasi Menghadirkan Layanan Pajak Daerah Keliling dengan nama LAKELING dengan menggunakan transaksi digital yang menggunakan QRIS guna untuk meningkatkan kuliatas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya wajib pajak daerah.

Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat mengharuskan pelayanan publik untuk segera dibenahi menuju pelayanan digital yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

Adapun pokok rencana kerja yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah dengan metode mekanisme kanal digital (QRIS).
2. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
3. Memanfaatkan teknologi untuk menekan pembayaran tunai ke non tunai untuk mengoptimalisasi penerimaan pendapatan daerah.

Lima jenis objek pajak yang difokuskan sebagai penerimaan yang memiliki potensi pendapatan daerah yaitu

- Pajak MBLB
- Pajak Restoran
- Reklame
- BPHTB
- Hotel

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi, maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah)	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	95,00
				Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	95,00
				Persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah	10,20

2.2.1 Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam tahun-tahun yang lalu mempunyai arah kebijakan yang akan diambil dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi meliputi:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda
3. Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Bapenda
4. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja Bapenda

Secara umum program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) sasaran yang ditetapkan.

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memperkuat pendanaan sumber – sumber belanja daerah	Persentase tingkat kemandirian keuangan daerah	21,32	23,11	23,93	26,07	26,55	27,73

Analisis Kinerja Pelayanan badan yang berpedoman pada Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Indikator Kinerja Sasaran OPD

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	95,00	95,00	95.20	95,40	95,60	95,80	
2	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah							
3	Persentase pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah							

Tabel Realisasi Pendapatan Tahun 2017-2021

TAHUN	REALISASI
2017	Rp. 1.365.172.782.139,53
2018	Rp. 1.466.152.959.822,66
2019	Rp. 1.513.976.802.499,03
2020	Rp1.495.670.435.578,65
2021	Rp1.549.649.873.412,52

Sumber Data : Audited BPK RI

Dari tabel di atas dapat dilihat progress realisasi pendapatan untuk lima tahun terakhir dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, terus mengalami peningkatan.

Tabel Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Tahun 2021

1	Pendapatan	%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	19,74
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11,82
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	0,27
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,48
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6,17
1.2	Dana Perimbangan	55,99
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan pajak	10,92
1.2.2	Dana Alokasi Umum	32,42
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	12,65
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24,27
1.3.1	Pendapatan Hibah	7,13
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	9,28
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,86

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase proporsi tertinggi dalam Realisasi Pendapatan terdapat pada Dana Perimbangan sebesar 55,99 Persen pada pos Dana Alokasi Umum sebesar 32,42 persen. sedangkan yang terendah ada pada Pendapatan Asli Daerah yang prosentasenya sebesar 19,74 Persen hanya sedikit lebih kecil dibanding Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 24,27%.

Kabupaten Luwu Timur

[illegible]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai koordinator Bidang Pendapatan Daerah, melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Badan Pendapatan Daerah tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pemerintah provinsi khususnya dibidang peningkatan kualitas pendapatan daerah agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai target pendapatan daerah. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pendapatan perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara lebih luas di seluruh Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
3. Memperkuat jaringan dan jangkauan operasional Layanan Pajak Daerah Keliling (LAKELING) bagi daerah yang masih kurang dari sisi jaringan komunikasi internet diperkuat dan jemput bola yang dianggap strategis bagi optimalisasi pendapatan;
4. Dalam situasi Pandemi Covid-19 dan pemberian pelayanan kepada wajib pajak, pelayanan ekstra dalam pengurusan pajak dan pembuatan SOP Berbasis standar Protokol Kesehatan didukung SDM baik kuantitas dan kualitasnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya.

Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya.

Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di segala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pajak belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja.
3. Masih terdapat wajib pajak yang belum tertib dilapangan.
4. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam optimalisasi PAD.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah.
- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- d. Membuat kebijakan terkait dengan perpajakan maupun penerimaan lainnya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran membayar pajak.
- e. Mengidentifikasi potensi-potensi penerimaan bagi peningkatan pendapatan daerah.
- f. Peningkatan pelayanan publik dalam pencairan dana sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD perlu dilakukan review setiap tahun. Adapun gambaran review terhadap rancangan awal Rencana Kerja pada Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Kab. Luwu Timur	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,00	9,512,135,126	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Kab. Luwu Timur	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95,00	12,267,464,560	
a.	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,00	65,794,000	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	68,794,000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	49.057.000	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	50.902.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.002.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.002.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	3.000.000	

6.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Yang Disusun	10	10.735.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Yang Disusun	3	11.890.000	
B	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)	95	7,514,039,147	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)	100	9,286,016,721	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan (orang)	29	7.383.968.147	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timur	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan (orang)	29	9.155.945.721	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu Timur	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Persen)	95	34.662.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Luwu Timur	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Persen)	95	34.662.000	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	19	95.409.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18	95.409.000	
C	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)	95,00	12,381,000	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)	100	13,581,000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Luwu	Jumlah dokumen	4	12.381.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen laporan	4	13,581,000	

	Pada SKPD	Timur	laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun tepat waktu			Pada SKPD		penatausahaan BMD pada SKPD yang disusun			
E	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	301,261,259	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	396.207,259	
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	98	37.966.259	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur	persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (persen)	98	40.642.259	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	100	30.465.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah ASN yang mengikuti peraturan perundang-undangan (orang)	100	23.105.000	
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah ASN yang mengikuti aparaturnya yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	29	232.830.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	29	332.460.000	
F	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95	485,605,200	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	100	769.510.600	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	10	5,300,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	25,300,000	

			n bangunan kantor yang disediakan					yang disediakan (jenis)			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2	2.182.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (unit)	2	2,182,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	25	5.131.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	18	5,131,000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	158.411.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Luwu Timur	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	158,411,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exampler)	132	13.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (exampler)	36	3,720,000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	1000	11.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	250	11,250,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	150	289.411.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	150	563.516.600	
9.	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)	95	665,680.000	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)	100	1.198.470.460	
1	Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	10	64.900.000	Pengadaan Mebel	Kab. Luwu Timur	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	45	82.823.000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	3	597.580.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unt)	36	1.115.647.460	
4	Pengadaan Sarana	Kab.	Jumlah sarana	2	3.200.000	Pengadaan Sarana	Kab. Luwu	Persentase capaian	0	0	

	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luwu Timur	dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)			dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Timur	barang milik daerah yang diadakan (unit)			
H	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)	100	279,454,520	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)	100	258,954,520	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (surat)	30000	27,154,520	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	3000	26.154.520	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	36	211.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu Timur	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	30	201.000.000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	3	40.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu Timur	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (orang)	3	31.800.000	
I	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)	95	187,920,000	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)	100	275,930,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	8	54.920.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Luwu Timur	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	8	54,920,000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	40	88,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	176.010.000	

			yang dipelihara								
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Luwu Timur	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	45.000.000	
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	97,50	2.885.400.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah (%)	97,50	3.100,338,590	
a.	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik (%)	97,50	2.885.400.000	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik (%)	97,50	3.100,338,590	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan yang disusun (dokumen)	4	112,182,000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan yang disusun (dokumen)	4	131.532.000	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun (dokumen)	6	172.520.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun (dokumen)	6	313.426.000	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak (persen)	80	179.835.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak (persen)	80	257.379.000	
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata (wajib oajak)	130	171.736.600	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata (wajib oajak)	130	239.031.600	
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Luwu Timur	Jumlah PBB P2 yang ditetapkan (Objek Pajak)	121.400	1.339.051.990	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Luwu Timur	Jumlah PBB P2 yang ditetapkan (Objek Pajak)	121.400	1.319.547.590	
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Luwu	Jumlah wajib pajak daerah	80	229.035.400	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB)	130	269.265.400	

	Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Luwu Timur	Jumlah PBB P2 yang ditetapkan (Objek Pajak)			Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Timur	Jumlah PBB P2 yang ditetapkan (Objek Pajak)			
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan (wajib pajak)	80	229.035.400	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan (wajib pajak)	130	269.265.400	
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi (persen)	87	44.939.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi (persen)	87	44.939.000	
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Jumlah Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah	264 Berita Acara 12 laporan	143.727.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah Jumlah Laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah	216 Berita Acara 12 laporan	113.817.000	
9	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	97	362.641.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Luwu Timur	Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah	97	411.401.000	
	Jumlah				12.267.803.116	Jumlah				15.367.803.150.	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:

- 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
- 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
- 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
- c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
- 5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
- 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Alamsus POLRI
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
- 7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
- 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Perekonomian dan Keanekaragaman Hayati dan Kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan untuk RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, dengan agenda pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional yaitu :

- 1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama;
- 2. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur;
- 3. Segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas;
- 4. Penyederhaan Birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran;
- 5. Transformasi Ekonomi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan penyusunan RENJA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang dan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan Tupoksi Badan Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sinkronisasi kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, Tujuan dan Sasaran Renja BAPENDA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengacu kepada Misi 4 yakni Terciptanya Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dengan arah kebijakan Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Aparatur Bapenda, Peningkatan kualitas kinerja Aparatur Bapenda, Peningkatan tertib administrasi kinerja Bapenda.

Adapun sasarannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber – Sumber Belanja Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan pengelolaan pendapatan daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur merencanakan akan melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan kegiatan sebanyak 9 (sembilan) yang didukung oleh 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

No	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
1.1	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

- 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- 7.1 Pengadaan Mebel
- 7.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7 KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

- 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1	KEGIATAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- 1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- 1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- 1.4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- 1.5 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 1.6 Penetapan Wajib Pajak Daerah
- 1.7 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- 1.8 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- 1.9 Penagihan Pajak Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas 2 program, 9 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp. 15.367.803.150,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

	PROGRAM DAN KEGIATAN	Rencana Tahun 2022 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.267.464.560	APBD
1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		68.794.000	APBD
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.902.000	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.002.000	APBD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	APBD
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.890.000	APBD
1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		9.286.016.721	APBD
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	9.155.945.721	APBD
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	95 Persen	34.662.000	APBD

	Kuangan SKPD			
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	18 Dokumen	95.409.000	APBD
1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		13.581.000	APBD
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Dokumen	13.581.000	APBD
1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		396.207.259	APBD
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Adminstrasi Kepegawaian	98 Persen	40.642.259	APBD
1.4.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 Orang	23.105.000	APBD
1.4.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	29 Orang	332.460.000	APBD
1.5	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		769.510.600	APBD
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	25.300.000	APBD
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	2.182.000	APBD
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18 Jenis	5.131.000	APBD
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	158.411.000	APBD
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Exemplar	3.720.000	APBD
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 orang	11.250.000	APBD
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Kali	563.516.600	APBD
1.6	KEGIATAN PENGADAAN BARAN MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1.198.470.460	APBD
1.6.1	Pengadaan Mebel	45 Unit	82.823.000	APBD
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit	1.115.647.460	APBD
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana	-	-	APBD

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
1.7	KEGIATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		258.954.520	APBD
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 Surat	26.154.520	APBD
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30 Rekening	201.000.000	APBD
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Orang	31.800.000	APBD
1.8	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		275.930.000	APBD
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	54.920.000	APBD
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Unit	176.010.000	APBD
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	45.000.000	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		3.100.338.590	APBD
2.1	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		3.100.338.590	APBD
2.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	131.532.000	APBD
2.1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	6 Dokumen	313.426.000	APBD
2.1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	80 Persen	257.379.000	APBD
2.1.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	130 WP	239.031.600	APBD
2.1.5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	121.400 OP	1.319.547.590	APBD
2.1.6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	130 WP	269.265.400	APBD

2.1.7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	87 Persen	44.939.000	APBD
2.1.8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	216 Berita Acara, 12 Laporan	113.817.000	APBD
2.1.9	Penagihan Pajak Daerah	97 Persen	411.401.000	APBD
JUMLAH			15.367.803.150	

Program dan Kegiatan tersebut di atas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah, antara lain pada misi ke 4 (empat), yaitu; **Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik** dengan tujuan **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber Sumber Belanja Daerah**

Untuk mewujudkan misi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan pengelolaan Pendapatan daerah sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk mewujudkan misi Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan kebijakan peningkatan penerimaan daerah (optimalisasi potensi-potensi pendapatan daerah) baik melalui peningkatan pajak daerah maupun retribusi daerah dan royalti baik dari sektor pertambangan pertambangan maupun sektor lain. Hal tersebut juga disertai dengan penyiapan dan perbaikan regulasi yang telah ada ataupun yang akan dikeluarkan/diterbitkan.

Adapun anggaran yang diajukan berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp.15.367.803.150,-** (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*) dengan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 terlampir.

Review Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Cata tan Pen ting	Prakiraan Maja Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Keglot on	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	0 2				KEUANGAN										12.267.803.116	15.267.803.150			15.858.146.912		
5	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										9.512.135.128	12.292.474.560			12.621.270.030		
5	0 2	0 1	2 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										65.794.000	68.794.000			99.087.000		
5	0 2	0 1	2 0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili	95 Persen	95 Persen	3 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	49.057.000	50.902.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	40.037.000
5	0 2	0 1	2 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili	95 Persen	95 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3.002.000	3.002.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	12.000.000
5	0 2	0 1	2 0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili	95 Persen	95 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	3.000.000	3.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	35.000.000

5	0	0	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	10 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	10.735.000	11.890.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	12.000.000
5	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7.514.039.147	9.286.016.721				10.907.979.871
5	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	29 Orang	29 Orang	100 Persen	100 Persen	7.363.968.147	9.155.945.721	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	10.752.979.871
5	0	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Persentase capaian administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	95 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen	34.662.000	34.662.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	35.000.000
5	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan yang disusun Waktu	Persentase koordinasi administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	19 Dokumen	18 Dokumen	100 Persen	100 Persen	95.409.000	95.409.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	120.000.000
5	0	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											12.381.000	13.581.000				13.581.000
5	0	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	Persentase laporan BMD perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen	100 Persen	12.381.000	13.581.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	13.581.000

5	0	0	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											301.261.259	396.207.259					260.796.259
5	0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapanannya yang diadakan	Persentase tercapainya kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	29 stel	29 stel	100 Persen	100 Persen	0	0			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	0
5	0	0	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	Persentase tercapainya kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	37.966.259	40.642.259	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	37.966.259
5	0	0	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase tercapainya kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	100 Orang	100 Orang	100 Persen	100 Persen	30.465.000	23.105.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	20.000.000
5	0	0	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase tercapainya kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	29 Orang	29 Orang	100 Persen	100 Persen	232.830.000	332.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	202.830.000
5	0	0	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah											485.605.200	769.510.600					538.047.600
5	0	0	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Persentase tercapainya Kinerja administrasi umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	10 jenis	10 jenis	100 Persen	100 Persen	5.300.000	25.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	5.300.000

5	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Persentase terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang memanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	3 unit	58 unit	100 Persen	100 Persen	597.560.000	1.198.470.460	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	198.000.000
5	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Persentase terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang memanfaatkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	2 unit	2 unit	100 Persen	100 Persen	3.200.000	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	120.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											279.454.520	258.954.520			274.600.000	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase tercapainya Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	3000 surat	3000 surat	100 Persen	100 Persen	27.154.520	26.154.520	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	30.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase tercapainya Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	36 rekening	30 rekening	100 Persen	100 Persen	211.500.000	201.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	204.000.000
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayan umum kantor yang dibayarkan	Persentase tercapainya Kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	3 Orang	3 Orang	100 Persen	100 Persen	40.800.000	31.800.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	40.800.000
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											167.920.000	275.930.000			194.010.000	
5	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	8 unit	8 unit	100 Persen	100 Persen	54.920.000	54.920.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	56.000.000
5	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	40 unit	40 unit	100 Persen	100 Persen	88.000.000	176.010.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	88.010.000

5	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kan dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase tpoer nunjang urusan pemerintahan ityasnig terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	95 Persen	95 Persen	1 unit	1 unit	100 Persen	100 Persen	45.000.000	45.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95 Persen	50.000.000
5	0	0	2	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											2.755.667.990	3.100.338.590				3.236.875.582
5	0	0	2	0	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah											2.755.667.990	3.100.338.590				3.236.875.582
5	0	0	2	0	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pendapatan yang disusun	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	97,50 Persen	97,50 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	95 Persen	95 Persen	112.182.000	131.532.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97,50 Persen	156.861.000
5	0	0	2	0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	jumlah regulasi pendapatan daerah yang disusun	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	97,50 Persen	97,50 Persen	6 Dokumen	6 Dokumen	95 Persen	95 Persen	172.520.000	313.426.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97,50 Persen	244.261.000
5	0	0	2	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Persentase meningkatnya kepatuhan wajib pajak	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kelurahan	97,50 Persen	97,50 Persen	80 Persen	80 Persen	95 Persen	95 Persen	179.835.000	257.379.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97,50 Persen	216.510.000
5	0	0	2	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang terdata	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	97,50 Persen	97,50 Persen	130 Wajib pajak	130 Wajib pajak	95 Persen	95 Persen	171.736.600	239.031.600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97,50 Persen	225.039.600
5	0	0	2	0	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Jumlah PBB P2 yang ditetapkan	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	97,50 Persen	97,50 Persen	121400 Objek pajak	121400 Objek pajak	95 Persen	95 Persen	1.339.051.990	1.319.547.590	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97,50 Persen	1.430.856.000
5	0	0	2	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	jumlah wajib pajak daerah (non PBB) yang ditetapkan (Wajib Pajak)	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	97,50 Persen	97,50 Persen	80 Persen	130 WP	95 Persen	95 Persen	229.035.400	269.255.400		Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97,50 Persen	279.184.400
5	0	0	2	0	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Persentase jumlah kasus pendapatan daerah yang terfasilitasi	Persentase tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Malili	97,50 Persen	97,50 Persen	87 Persen	87 Persen	95 Persen	95 Persen	44.939.000	44.939.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase tercapainya penerimaan pendapatan daerah	97,50 Persen	76.856.582

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini merupakan dokumen rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dalam mendukung tercapainya Visi “ **Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**” dan target pembangunan yang telah dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah juga merupakan dokumen perencanaan dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan tahun 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Selain sebagai dokumen perencanaan, Renja berfungsi pula sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 Lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang demi tercapainya visi dan misi serta kebijakan dan prioritas pembangunan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Malili, Juli 2022
KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH,

MUHAMMAD SAID, SE,MM
Pangkat : Pembina
NIP. 19790313 200502 1 010